
PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN NELAYAN KUMUH DI DESA KURAU, KECAMATAN Koba, KABUPATEN BANGKA TENGAH

Bani Dipra Ramdani¹ dan Ragil Haryanto²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : banikuhidupku@gmail.com

Abstrak: Penataan Kawasan Kumuh merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah atau kurang mampu dan lingkungan tidak layak huni. Penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus merupakan upaya terpadu yang saling mendukung dan saling bersinergi dalam mencapai sasaran manfaat yang optimal. Begitu pula dengan Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah sangat berpotensi untuk memunculkan kawasan permukiman kumuh, serta kondisi budaya/tradisi masyarakat yang dapat menimbulkan permukiman kumuh antara lain yaitu membuang sampah dan kotoran di sungai, membuang sampah di sembarang tempat serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Melihat kondisinya, Desa Kurau perlu untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakatnya sehingga perlu dilakukan penataan kawasan permukiman nelayan kumuh. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah terhadap penataan kawasan permukiman nelayan kumuh di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Dimana masyarakat ditawarkan dengan dua pilihan yaitu pindah dengan kata lain relokasi atau tetap tinggal sehingga dilaksanakan konsolidasi lahan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, dan tabulasi silang atau crosstab sedangkan populasinya yaitu semua pihak yang terkait dengan penataan kawasan sehingga menggunakan metode sensus, kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan tabulasi silang atau crosstab diperoleh kesimpulan dengan terjawabnya pertanyaan penelitian yaitu masyarakat memilih untuk tetap tinggal atau dilaksanakan konsolidasi lahan dalam rangka penataan kawasan permukiman nelayan kumuh di Desa Kurau. Preferensi masyarakat ini dipertimbangkan dari beberapa hal diantaranya aksesibilitas, kenyamanan serta kondisi sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Preferensi Masyarakat, Penataan Kawasan, Permukiman Nelayan Kumuh Desa Kurau.

Abstract: Squatters Areas arrangement is an effort to improve the quality and standard of living, especially the low income bracket or less capable and uninhabitable environment. Handling problems of slum areas can not be done unilaterally, but rather must be a concerted effort of mutual support and synergy in achieving optimal benefits. Similarly, the village Kurau, District Koba, Central Bangka regency where some community-eyed search as fishermen. Conditions of low socio-economic communities has the potential to bring the slum areas, as well as the culture conditions / community traditions that can lead to slums, among others, throw their waste in the river, throwing litter and the lack of public awareness to keep clean and healthy environment . Seeing his condition, the Village Kurau need to improve the living standards of quality and so we need to restructure the fishing settlement slums. The purpose of the study is to determine how people's preference to stay or move to the arrangement of the fishing settlement in the village slum Kurau, District Koba, Central Bangka regency. Where the public is offered with two options, namely to move in other words remain relocation or consolidation of land so held. The method used in this research is using descriptive analysis and cross tabulation or crosstab while the population of all parties concerned with the arrangement kawasan so using census method, then the

primary and secondary data was analyzed quantitatively. After conducting research using cross tabulation or crosstab is concluded with a research question that is being answered people choose to stay or land consolidation undertaken in the framework of the fishing settlement arrangement slum village Kurau. Consideration of the public's preferences several things including accessibility, comfort and condition of facilities and infrastructure.

Keywords: Community preference, Settlement Planning Area, Squatters Village Settlement Fishermen Kurau.

PENDAHULUAN

Kondisi kota-kota di Indonesia yang umumnya berkembang pesat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah pedesaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lain termasuk lapangan kerja. Kondisi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan terjadinya perambahan penduduk yang lebih pesat dari pada kemampuan Pemerintah dalam menyediakan hunian serta layanan primer lainnya serta tumbuhnya kawasan permukiman yang kurang layak huni, yang pada berbagai kota cenderung berkembang menjadi kumuh, dan tidak sesuai lagi dengan standard lingkungan permukiman yang sehat.

Penataan Kawasan Kumuh merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah dan sangat rendah yang masih menempati lingkungan tidak layak huni. Pendekatan dan kesinambungannya berlandaskan pembangunan bertumpu pada masyarakat. Karenanya proses pelaksanaan dan penyelenggaraannya harus benar-benar dipahami masyarakat.

Sesuai undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka peremajaan lingkungan permukiman kumuh sangat penting dalam usaha memberikan bantuan program dan kegiatan dari pemerintah yang sifatnya pendorongan (*stimulan*) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya program-program yang bersifat stimulatif, pendampingan terhadap

masyarakat bahkan dukungan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan.

Berlanjutnya krisis ekonomi, Pemerintah Pusat dan daerah semakin menaruh perhatian kepada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan bermukim di kawasan kumuh, baik yang berstatus legal (*slum areas*) ataupun ilegal (*squatters areas*), seperti pada daerah bantaran sungai, tepian pantai, dan pinggiran rel kereta api. Kegiatan pokok penyelenggaraan bidang perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, dan mendorong perwujudan kondisi lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, termasuk melalui penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman nelayan kumuh.

Meningkatnya pertambahan penduduk di daerah perkotaan terutama di daerah pinggiran kota-kota, diakibatkan mengalirnya arus urbanisasi, hal ini menimbulkan masalah ketidakseimbangan persediaan tanah pemukiman dan sarana jalan raya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memerlukan. Dengan demikian dapat berakibat tidak terkendalinya penggunaan tanah oleh masyarakat sehingga akan terbentuk daerah atau lingkungan yang tidak teratur, timbulnya pemukiman-pemukiman liar, jalan yang berkelok-kelok dan sebagainya. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pembangunan wilayah pemukiman yang sekarang berjalan kurang serasi dan kurang terkendali. Hal ini disebabkan karena penyediaan tanah untuk prasarana umum oleh pemerintah sering terlambat atau ketinggalan dengan lajunya pembangunan

perumahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dan terbatasnya penyediaan dana oleh pemerintah untuk pembebasan tanah yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Begitu pula dengan Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah sangat berpotensi untuk memunculkan kawasan permukiman kumuh, serta kondisi budaya/tradisi masyarakat yang dapat menimbulkan permukiman kumuh antara lain yaitu membuang sampah dan kotoran di sungai, membuang sampah di sembarang tempat serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya. Maka diperlukan suatu penataan kawasan. Adapun salah satu cara untuk melakukan penataan di Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah adalah melalui relokasi dan atau konsolidasi tanah (*land consolidation*). Penatagunaan tanah termasuk di dalamnya adalah pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan Desa Kurau sebagai suatu upaya untuk dapat secara berkelanjutan dan konsisten mengarahkan pemanfaatan, penggunaan dan pengembangan tanah secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dimana pengendalian dan pengawasan justru harus dapat menjadi alat pemacu secara terarah dan terkendali bagi potensi pengembangan / pembangunan lahan.

KAJIAN LITERATUR

Permukiman Nelayan Kumuh

Keberadaan lingkungan permukiman nelayan sangat berkaitan erat dengan sumber penangkapan ikan, daerah distribusi hasil tangkapan dan daerah pantai, dimana pantai harus mudah dicapai oleh publik dengan sistem transportasi dan jaringan jalan yang baik, diperkaya dengan berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang mempesona tanpa harus merusak keserasian lingkungan (Budiharjo, 1992). Menurut Suprijanto (2000 : 16), karakteristik ekonomi, sosial dan budaya

dari kota tepi pantai, tempat berkembangnya permukiman nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keunggulan lokasi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi;
- b. Penduduk mempunyai kegiatan sosial-ekonomi yang berorientasi ke air dan darat;
- c. Rata-rata penduduk golongan ekonomi lemah, dengan latar belakang pendidikan relatif terbatas
- d. Pengetahuan akan lingkungan sehat cenderung masih kurang, terjadi kebiasaan '*tidak sadar lingkungan*' serta cenderung kurang memperhatikan bahaya dan resiko.
- e. Terdapat peninggalan sejarah/budaya.
- f. Terdapat masyarakat yang secara tradisi terbiasa hidup (bahkan tidak dapat dipisahkan) di atas air.. Terdapat pula budaya/tradisi pemanfaatan perairan sebagai sarana transportasi utama.
- g. Merupakan kawasan terbuka (akses langsung), sehingga rawan terhadap keamanan, seperti penyelundupan, penyusupan (masalah pertahanan dan keamanan) dsb.

Penataan Kawasan

Masrul (2008) menyebutkan bahwa pusat penelitian dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan kriteria pokok pengembangan sebagai berikut :

- a) Perlu keselarasan pembangunan untuk kepentingan pribadi dan umum.
- b) Perlu memperhatikan tata air, budaya lokal, serta kepentingan umum.
- c) Pengembangan kawasan permukiman dapat dibedakan atas kawasan permukiman penduduk asli dan kawasan permukiman baru.
- d) Pada permukiman atau perumahan nelayan harus dilakukan upaya penataan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kawasan
- e) Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman penduduk asli (lama) antara lain melalui revitalisasi bangunan, penyediaan utilitas, penanganan sarana air bersih, air limbah dan persampahan,

penyediaan dermaga perahu, serta pemeliharaan drainase.

- f) Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman baru antara lain melalui penataan bangunan dengan memberi ruang untuk public access ke badan air, pengaturan pengambilan air tanah, reklamasi, pengaturan batas sempadan dari badan air, dan program penghijauan sempadan.

Preferensi Masyarakat

Ardana (2010) menjelaskan, preferensi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hak untuk didahulukan atau diutamakan daripada yang lain. Preferensi juga berarti pilihan, prioritas atau kecenderungan. Sedang masyarakat atau disebut juga komunitas adalah sekelompok orang yang hidup dan berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Dari pengertian istilah dalam KBBI ini, maka preferensi masyarakat tepi sungai kurau mengandung pengertian bahwa pilihan atau kecenderungan masyarakat untuk menempati kawasan tepi sungai kurau dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

menurut Ardana (2010) masyarakat bermukim disuatu tempat ditentukan oleh pertimbangan: (1) aksesibilitas, (2) keamanan, (3) kenyamanan, (4) sarana prasarana. Aksesibilitas berhubungan dengan letak permukiman ke pusat kota, sarana transportasi, dan mitigasi bencana. Keamanan berkaitan dengan terlindung dari bencana alam dan tempat melakukan aktivitas sehari-hari. Kenyamanan adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, kedekatan dengan tempat kerja, dan kehidupan sosial budaya. Sedang sarana prasarana adalah ketersediaan lahan, status rumah dan ketersediaan sarana dan prasarana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga data yang didapatkan berasal dari kuesioner serta wawancara dan deskriptif melalui kebijakan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Menurut John W. Creswell (2009 : 11) mengungkapkan bahwa suatu pendekatan dengan mencari suatu kompleksitas dalam penelitian termasuk dalam pandangan dunia Konstruktivisme Sosial. Penelitian ini didasarkan pada pengukapan narasumber dengan pandangan yang berbeda tentang pilihan masyarakat terhadap penataan kawasan. Penelitian ini termasuk dalam suatu penelitian yang cukup praktis dan mudah dipahami dan terdapat beberapa kelebihan diantaranya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu patokan dalam arahan pengembangan kawasan, karena bersifat deskriptif dari narasumber dan pengolahan data yang berupa deskriptif kuantitatif dengan kuesioner dan telaah dokumen.

Metode analisis yang digunakan untuk merumuskan hasil penelitian pelayanan pasar di kawasan perbatasan adalah menggunakan analisis deskriptif dan dilanjutkan dengan analisis tabulasi silang atau crosstab. Kedua metode analisis tersebut digunakan untuk mengetahui preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah terhadap penataan kawasan permukiman nelayan kumuh Desa Kurau. Berikut jumlah populasi yang tercantum **Tabel 1** dibawah ini.

TABEL I
JUMLAH POPULASI

Lokasi	Jumlah KK
RT 01 Kurau Timur	23
RT 01 Kurau Barat	49
RT 05 Kurau Barat	57
RT 04 Kurau Timur	34
Total	163

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

HASIL PEMBAHASAN

Analisis Pengklasteran

Dalam melakukan analisis preferensi masyarakat terhadap penataan kawasan permukiman nelayan kumuh dilakukan pembagian wilayah atau yang disebut dengan pengklasteran. Pengklasteran ini didasarkan pada letak geografis seperti sungai, ataupun jalan, kemudian secara demografis seperti jumlah penduduk, jumlah anggota keluarga,

serta berdasarkan sifat lainnya. Masyarakat tepi sungai Desa Kurau dibagi menjadi 4 klaster dimana setiap bagiannya memiliki jumlah rumah serta jumlah kepala keluarga yang berbeda. Pembagian klaster tersebut berdasarkan atas batasan secara geografis baik yang buatan maupun yang alami seperti jalan wilayah RT dan sungai. Rumah terbanyak terdapat pada klaster tiga dimana tercatat 57 rumah yang direncanakan untuk dilakukan penataan kawasan, selanjutnya adalah klaster dua sejumlah 49 rumah, lalu klaster empat dengan jumlah 34 rumah, dan terakhir klaster satu yang paling sedikit jumlahnya yaitu 23 rumah.

1. Klaster satu terletak di RT 01 Desa Kurau Timur, dimana pada klaster ini berbatasan langsung dengan sungai kurau disebelah utara, sebelah selatan dengan jalan lokal, sebelah barat dengan jalan utama pangkalpinang-koba, serta sebelah timur dengan TPI (tempat pelelangan ikan).
2. Klaster dua terletak di RT 01 Desa Kurau Barat, dimana pada klaster ini berbatasan langsung dengan sungai kurau disebelah selatan, sebelah utara dengan jalan lokal, sebelah barat dengan jalan utama pangkalpinang-koba, serta sebelah timur dengan laut cina selatan langsung.
3. Klaster tiga terletak di RT 05 Desa Kurau Timur, dimana pada klaster ini berbatasan langsung dengan sungai kurau disebelah selatan, sebelah utara dengan jalan lokal atau lahan kosong, sebelah timur dengan jalan utama pangkalpinang-koba, serta sebelah timur dengan lahan kosong.
4. Klaster satu terletak di RT 04 Desa Kurau Timur, dimana pada klaster ini berbatasan langsung dengan sungai kurau disebelah utara, sebelah selatan dengan jalan lokal, sebelah timur dengan jalan utama pangkalpinang-koba, serta sebelah barat dengan lahan kosong.

Analisis Permukiman Nelayan Kumuh

Kawasan tepi sungai Desa Kurau merupakan lingkungan hunian yang kualitasnya tidak

layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luas lahan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya karena letaknya yang persis pada sempadan sungai.

Analisis permukiman nelayan kumuh ini perlu dilakukan agar diketahui secara tepat lokasi permukiman kumuh untuk kemudian dirumuskan usaha-usaha penanganannya. Analisis permukiman nelayan kumuh di Desa Kurau ini dapat dilihat dari perilaku kehidupan nelayan dan ekonomi, dan keadaan kepemilikan rumah dan lahan.

Kondisi sosial ekonomi adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Atau juga dapat diartikan kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si pembawa status. Pada analisis ini dilakukan beberapa analisis, yaitu :

- Analisis Perilaku Kehidupan Nelayan
- Analisis Pendapatan dan Belanja Masyarakat Nelayan
- Hubungan Antara Tingkat Kekumuhan dengan Perilaku kehidupan nelayan dan Pendapatan Belanja Masyarakat Nelayan
- Analisis Kepemilikan Rumah dan Lahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masyarakat tepi sungai Desa Kurau mempunyai karakteristik atau memiliki ciri-ciri sebagai permukiman kumuh nelayan dimana ciri khas tersebut adalah pendapatan mereka yang tergolong rendah, tingkat pendidikan yang rendah juga, serta mata pencaharian utama yang didominasi oleh nelayan, baik itu nelayan buruh ataupun nelayan bos. Pada kondisi ini mata pencaharian merupakan hal yang paling berpengaruh dimana hubungannya dengan yang lain memiliki nilai korelasi yang paling besar.

Analisis Kebutuhan Hunian

Analisis kebutuhan hunian dilakukan dengan tujuan agar mengetahui kebutuhan masyarakat akan kehuniannya. Dalam menganalisis kebutuhan hunian masyarakat desa kurau khususnya masyarakat tepi sungai yaitu dilakukan analisis kebutuhan hunian masyarakat, kemudian dilakukan juga analisis sarana dan prasarana yang ada di sekitar permukiman. Berikut analisis yang dilakukan :

- Analisis Kebutuhan Hunian Masyarakat
Kebutuhan hunian setiap individu sudah terpenuhi jika melihat luasan rumah yang ada dimana setiap orang minimal dengan kebutuhan ruang sebanyak 9 m².
- Analisis Jaringan Jalan
Menurut peraturan menteri perumahan rakyat nomer 32 tahun 2006 bahwa standar untuk jalan lingkungan adalah 3,5 meter – 4 meter. Sedangkan jalan yang ada di permukiman tepi sungai kurau semuanya tidak sesuai dengan standar, ini dikarenakan kurangnya lahan yang tersedia terutama pada klaster satu dan klaster dua. Kondisi jaringan jalan yang tergolong cukup baik, dengan perkerasan aspal dan kategori jalan kolektor sekunder yang merupakan salah satu jalan utama di Kabupaten Bangka Tengah. Kondisi demikian mendukung pengembangan aktivitas permukiman yang ada di tepi sungai kurau karena mempermudah akses masyarakat sehingga mampu menjadikan kualitas hidup dan kualitas lingkungan menjadi lebih baik.
- Analisis Drainase
Dukungan saluran drainase yang kurang optimal dalam mencegah potensi banjir di menjadi salah satu faktor pendorong permukiman menjadi kumuh. Dengan adanya sistem drainase yang kurang mampu mencegah terjadinya banjir, permukiman tersebut kurang aman untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman sehingga perbaikan dalam sistem drainase.

- Analisis Persampahan
Sebagai kawasan dengan aktivitas yang cukup padat, pengelolaan persampahan di permukiman tepi sungai Desa Kurau belum cukup baik. Dalam penanganan persampahan, baik rumah tangga belum disediakan tempat sampah pada masing-masing bangunan atau rumah. Untuk pengelolaan lebih lanjut, sampah tidak dikumpulkan pada TPS sehingga masyarakat membuang langsung ke sungai atau dibiarkan pada suatu tempat hingga menunggu sampah tersebut terbawa oleh air sungai. Perlu adanya sistem pengangkutan sampah yang terkoordinir dengan baik di bawah penanganan lembaga kebersihan setempat. Oleh karena itu, kondisi kebersihan di permukiman tepi sungai kurau sangat kurang terjaga. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan permukiman tepi sungai kurau menjadi kumuh. Dengan kondisi kebersihan yang terjaga, pengembangan permukiman tepi sungai kurau akan menjadi kondusif sehingga berjalan dengan pesat.
- Analisis Jaringan Listrik
Seharusnya setiap rumah menggunakan KWH sendiri tetapi masih banyak warga yang ikut saudara atau tetangganya dalam memenuhi kebutuhan listrik. Akan tetapi, dukungan atau pasokan listrik oleh PT. PLN dapat dikatakan telah memadai menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk tinggal dipermukiman tepi sungai. Dengan terpenuhinya pasokan listrik yang cukup, maka aktivitas masyarakat juga dipastikan akan berjalan dengan baik dan lancar.
- Analisis Sistem Sanitasi
Kondisi sanitasi yang kurang memadai menjadikan pengembangan aktivitas masyarakat tepi sungai menjadi kumuh. Dengan adanya sistem sanitasi yang baik, maka keseimbangan lingkungan akan tetap terjaga seiring dengan pesatnya penataan yang akan dilakukan dipermukiman tepi sungai kurau.

- Analisis Air Bersih
Oleh Departemen sosial Desa Kurau di berikan 5000 liter setiap harinya untuk kebutuhan air bersih, sedangkan menurut Departemen Pekerjaan Umum kebutuhan air setiap harinya diperkirakan lebih dari 5000 liter, sehingga masyarakat hampir kekurangan air bersih dalam setiap harinya. Mengingat pentingnya peran pemenuhan air bersih bagi masyarakat tepi sungai Desa Kurau, pelayanan yang kurang optimal bagi penyediaan air bersih menjadi salah satu faktor pendorong kurangnya kualitas hidup dipermukiman tepi sungai kurau. Seiring dengan semakin pesatnya aktivitas permukiman tepi sungai, maka diperlukan penyesuaian pelayanan penyediaan air bersih supaya optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat.
- Analisis Jaringan Telekomunikasi
Untuk memenuhi kemudahan komunikasi yang mempermudah dan mendukung aktivitas permukiman di tepi sungai kurau, jaringan telekomunikasi yang disediakan belum masuk ke permukiman. Untuk internet, belum menjamah kedalam permukiman. Sedangkan untuk kepentingan perseorangan, masyarakat lebih memilih menggunakan telepon seluler yang lebih praktis. Kondisi dukungan telekomunikasi yang masih kurang memadai tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kurang berkembang aktivitas masyarakat di permukiman tepi sungai Desa Kurau. Dengan adanya dukungan telekomunikasi tersebut, maka masyarakat yang beraktivitas di permukiman tersebut akan mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi.

Analisis Preferensi Masyarakat

Preferensi adalah pilihan, kecenderungan, atau hak untuk didahulukan dibandingkan yang lain. Preferensi masyarakat berarti pilihan masyarakat terhadap suatu kondisi. Untuk mengetahui preferensi masyarakat kurau akan rencana penataan kawasan yang akan

dilakukan di kawasan tempat tinggalnya dibagi atas beberapa variabel yaitu tanggapan masyarakat terhadap penataan kawasan, kemudahan dalam melakukan aksesibilitas, kenyamanan, dan adanya penyediaan sarana dan prasarana publik yang dijelaskan sebagai berikut ini:

- Kemudahan Aksesibilitas
Arah pergerakan masyarakat lebih dekat kepada jalan utama dan mata pencarian yaitu lebih dekat lokasi awal dibandingkan lokasi yang direncanakan. Garis warna kuning merupakan tujuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan garis warna ungu merupakan tujuan mereka dalam mencari nafkah yaitu mencari ikan. Secara tidak langsung, keberadaan lokasi awal mereka yang dirasa strategis membuat mereka untuk enggan meninggalkan lokasi yang sudah mereka tempati sejak lama tersebut. Selain itu kekerabatan dan kerukunan bertetangga mereka sudah sangat kental yang membuat mereka sulit untuk dipisahkan. Rasa saling membantu, tolong menolong membuat mereka merasa nyaman untuk tetap tinggal di daerah tepi sungai kurau.
- Kenyamanan
Untuk melihat tingkat kenyamanan, peneliti mencoba melakukan tabulasi silang atau crosstab antara preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah dengan mata pencaharian, kepemilikan rumah, kepemilikan lahan, kepemilikan perahu, dan lama tinggal. Hasilnya :
 - ✓ Terdapat hubungan antara preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah dengan mata pencaharian
 - ✓ Terdapat hubungan antara preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah dengan kepemilikan rumah
 - ✓ Tidak terdapat hubungan antara preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah dengan kepemilikan lahan

- ✓ Terdapat hubungan antara preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah dengan kepemilikan perahu
- ✓ Terdapat hubungan antara preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah dengan lama tinggal
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik
Dengan kondisi sarana dan prasarana yang buruk masyarakat tetap memilih untuk tetap tinggal. Setelah dilakukan tabulasi silang atau crosstab didapat hasil bahwa terdapat hubungan antara preferensi masyarakat untuk tetap tinggal atau pindah dengan kondisi sarana prasarana, ini menunjukkan bahwa walaupun dengan kondisi sarana dan prasarana kurang baik masyarakat tetap memilih untuk tetap tinggal.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat tepi sungai Desa Kurau mempunyai karakteristik atau memiliki ciri-ciri sebagai permukiman kumuh nelayan dimana ciri khas tersebut adalah pendapatan mereka yang tergolong rendah, tingkat pendidikan yang rendah juga, serta mata pencaharian utama yang didominasi oleh nelayan, baik itu nelayan buruh ataupun nelayan bos.
2. Kondisi sarana dan prasarana yang buruk membuat lingkungan mereka menjadi kumuh. Kondisi drainase yang menggantung pada drainase primer yaitu sungai kurau membuat masyarakat tidak memiliki drainase sekunder ataupun sedikit sekali yang memiliki drainase tersier. Persampahan yang belum dikelola dengan baik membuat lingkungan menjadi kotor dan berbau sampah. Kebutuhan air bersih juga masih menggantung pada air sungai kurau dimana kualitas airnya tidak begitu bagus.
3. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan tabulasi silang atau crosstab maka terjawablah pertanyaan

penelitian yaitu masyarakat memilih untuk tetap tinggal atau dilaksanakan konsolidasi lahan dalam rangka penataan kawasan permukiman nelayan kumuh di Desa Kurau. Preferensi masyarakat ini dipertimbangkan dari beberapa hal diantaranya aksesibilitas, kenyamanan serta kondisi sarana dan prasarana.

Rekomendasi

Kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penataan permukiman nelayan kumuh di Desa Kurau yaitu:

1. Keberhasilan penataan kawasan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sentuhan dan peran serta dari masyarakat dan swasta merupakan salah satu cara ampuh untuk mengatasi kawasan permukiman nelayan di Desa Kurau yang masih amburadul atau tidak tertata. Kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan merupakan faktor pendorong yang harus digalakkan dalam setiap individu. Masyarakat Desa Kurau pada umumnya dan masyarakat di sekitar tepi sungai pada khususnya, harus memberikan peran serta dalam menjaga kelestarian, keindahan, serta kenyamanan, sehingga beban untuk penataan kawasan tidak berada sepenuhnya dipundak pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Diharapkan keterlibatan pihak lain juga dapat membantu kegiatan pemerintah dalam penataan permukiman nelayan Desa Kurau di luar peran pemerintah.
2. Manfaat yang diterima oleh pemilik tanah apabila dilaksanakan Konsolidasi lahan (*land consolidation*) antara lain ; tanah menjadi teratur baik bentuk, luas dan letaknya, peningkatan manfaat dan nilai tanah, lingkungan menjadi tertata dengan baik, tidak mengeluarkan biaya serta tersedianya fasilitas umum untuk kepentingan bersama.
3. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum serta kantor pertanahan Kabupaten Bangka Tengah

untuk lebih aktif lagi melakukan penyuluhan-penyuluhan demi tertib administrasi pertanahan termasuk keindahan kota melalui program konsolidasi tanah (*land consolidation*) perkotaan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tengah.

4. Manfaat yang diterima pemerintah Kabupaten Bangka Tengah antara lain ; memudahkan pemerintah menjalankan proyek pembangunan sesuai rencana tata ruang Kabupaten Bangka Tengah, mempercantik wajah Kabupaten Bangka Tengah, menghilangkan kesan semrawut sehingga Kabupaten Bangka Tengah khususnya Desa Kurau tetap menjadi tujuan pariwisata domestik maupun mancanegara, penghematan karena tidak perlu menyediakan dana untuk pembebasan tanah, menciptakan wilayah sesuai dengan asas penataan lingkungan, yang artinya adanya kepastian hukum terhadap pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan tanah atau kawasannya. Sedangkan manfaat yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah setelah pelaksanaan program Konsolidasi lahan (*land consolidation*) antara lain ; Sangat membantu proses sertifikasi tanah di Kabupaten Bangka Tengah khususnya di Desa Kurau atau tertib administrasi pertanahan dan lokasi obyek konsolidasi dapat dibuatkan peta.

Budihardjo, Eko. 1992. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung : Alumni.

Imron, Masyuri (ed), 2003. "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan", dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya. Jakarta: PMB – LIPI

John W. Creswell, 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: Sage Publications Ltd

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Edisi Ketiga

Masrul, Wati. 2008. *Tesis: Perancangan Kawasan Waterfront Dumai Sebagai Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Wisata (Studi Kasus: Kawasan Pelindo – Jalan Datuk Laksmana, Dumai – Riau)*. Bandung: ITB

Suprijanto, Iwan. 2000. Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi laut/pantai (*coastal city*) di Indonesia – Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global <http://sim.nilim.go.jp/GE/SEMI2/Proceedings/Makalah%2016.doc> diakses pada 12 April 2013 pukul 22.45 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I Made. 2010. *Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Relokasi Permukiman Rawan Bencana di Kelurahan Malabero Kota Bengkulu*, Tesis, Semarang: UNDIP, Tidak dipublikasikan.
- Aries, Yuwono. 2009. *Arahan Penanganan Permukiman di Sepanjang Koridor Sungai Musi, Kota Sekayu Berdasarkan Pertimbangan Preferensi Masyarakat*. Tesis. Semarang: UNDIP, Tidak dipublikasikan.